



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SAMARINDA**

Indeks Persepsi Korupsi

*Laporan Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi
Triwulan III - 2025*

**Jl Bung Tomo No 136 Samarinda
informasi@ptun-samarinda.go.id
(0541) 262062**

DAFTAR ISI

A.	Pendahuluan	2
1.	Umum.....	2
2.	Maksud dan Tujuan.....	3
3.	Ruang Lingkup	3
4.	Dasar	3
B.	Kegiatan yang dilaksanakan.....	4
1.	Metode Penelitian	4
2.	Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	4
3.	Teknik Analisa Data	5
4.	Tahapan Pelaksanaan	5
5.	Analisa Data.....	7
1)	Profil Responden	7
2)	Perhitungan Hasil Survey	11
C.	Hasil yang dicapai	14
D.	Simpulan dan Saran	14
E.	Penutup	15



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Jalan Bung Tomo Nomor 136, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur, www.ptun-samarinda.go.id, informasi@ptun-samarinda.go.id

LAPORAN

TENTANG

Hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi Triwulan III Tahun 2025
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A. Pendahuluan

1. Umum

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah lembaga peradilan yang berperan untuk menerima dan memutus sengketa tata usaha negara, dan

menyelenggarakan fungsi layanan umum kepada masyarakat. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mempunyai wilayah Yuridiksi pada Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.

Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya di luar tarif resmi yang telah ditetapkan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi ini adalah untuk mengukur tingkat persepsi korupsi sebagai referensi pengambilan kebijakan dalam upaya pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Tujuan dari penyusunan Laporan Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi ini yaitu tersusunnya rekomendasi dalam kajian / pembahasan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi mencakup Survey Indeks Persepsi Korupsi terhadap pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

4. Dasar

- a. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- d. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- f. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029.
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

Selama periode Triwulan III (Juli - September) Tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah melaksanakan Survey Indeks Persepsi Korupsi terhadap pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, responden mengisi survei melalui aplikasi e-Survey pada laman https://survei.djmt.id/ptun_samarinda. Pelaksanaan Survey Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka - angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka.

Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan atau dengan data minimal 30 (tiga puluh). Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas. Pengawas tersebut akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survey IPK.

3. Teknik Analisa Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data kepuasan diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana 1 (satu) merupakan skor indeks paling rendah dan nilai 4 (empat) merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas pelayanan yang sangat baik.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan pada setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Kepuasan Pelayanan Publik pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 6 yang kemudian dikonversikan ke dalam angka 0 – 100. Skala indeks kepuasan antara 1 – 6, yang bilamana mendekati nilai 6 maka tingkat kepuasan akan semakin baik (sangat baik).

4. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survey lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survey persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:



Gambar 1. Model Alur Penyusunan Survey Persepsi Korupsi

Ruang Lingkup survey Indeks Persepsi Korupsi ada 5 (lima), yaitu:

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini
2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini
3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini
4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini
5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

Skala penilaian terhadap masing-masing unsur menggunakan skema likert, dengan nilai terendah = 1 (satu) sampai dengan nilai tertinggi = 6 (enam). Nilai IPK dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan index kepuasan masyarakat terhadap 5 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Bobot Nilai rata-rata tertimbang dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}} = \frac{1}{5} = 0.20$$

Catatan : jumlah bobot seluruh unsur tetap 1

Untuk mendapatkan nilai IPK digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$IKM = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IPK yaitu antara 16,67 sampai dengan 100, nilai tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 16,67.

$$\text{Nilai Konversi IIPK} = \text{IPK} \times 16,67$$

$$\text{Catatan : Nilai dasar} = \frac{\text{jumlah nilai}}{\text{skala nilai tertinggi}} = \frac{100}{6} = 16,67$$

Nilai perhitung pengolahan index tersebut dikonversikan untuk memperoleh Nilai Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan. Konversi nilai index tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 . Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25 – 64,99	D	Tidak Bersih Dari Korupsi
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Bersih Dari Korupsi
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Cukup Bersih Dari Korupsi
4	3,5324 – 4,00	88,31 - 100	A	Bersih Dari Korupsi

5. Analisa Data

1) Profil Responden

Responden yang mengisi Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Triwulan III (Juli s.d September) Tahun 2025 adalah 30 (tiga puluh) responden. Responden tersebut adalah para pihak / pengunjung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dari berbagai usia, tingkat pendidikan dan pekerjaan.

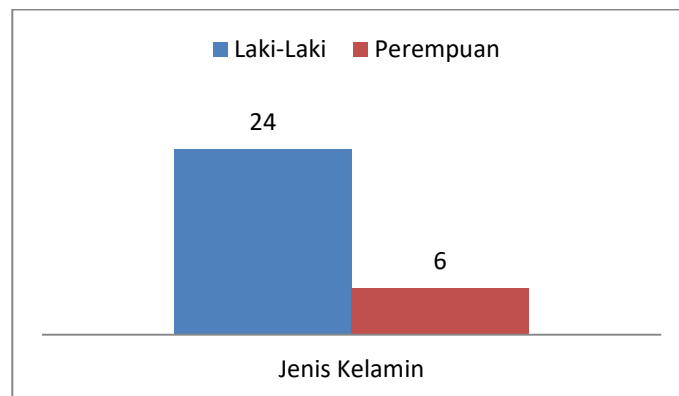
a Jenis Kelamin Responden

Dari 30 (tiga puluh) responden yang mengisi kuesioner tersebut ada 80% jenis kelamin laki-laki dan 20% jenis kelamin perempuan. Berikut tabel responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 2. Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	24	80,00%
2	Perempuan	6	20,00%
	Jumlah Responden	30	100,00%

Grafik 1. Jenis Kelamin Responden



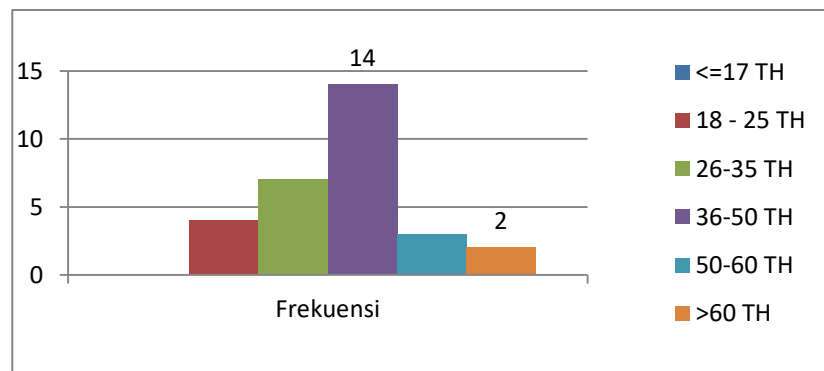
b Kelompok Usia Responden

Dari 30 (tiga puluh) responden yang mengisi kuesioner tersebut, ada 13,33% responden dengan usia antara 18 s.d 25 Tahun, 23,33% responden dengan usia antara 26 s.d 35 Tahun, 46,67% responden dengan usia antara 36 s.d. 50 Tahun, 10,00% responden dengan usia antara 51 s.d. 60 Tahun dan 6,67% responden dengan usia diatas 60 Tahun. Berikut table responden berdasarkan usia.

Tabel 3. Umur Responden

No.	Umur Responden	Frekuensi	Persentase
1	Dibawah 18 Tahun	0	0,00%
2	18 s.d 25 Tahun	4	13,33%
3	26 s.d 35 Tahun	7	23,33%
4	36 s.d 50 Tahun	14	46,67%
5	51 s.d 60 Tahun	3	10,00%
6	Diatas 60 Tahun	2	6,67%
Jumlah Responden		30	100,00%

Grafik 2. Umur Responden



c Tingkat Pendidikan Responden

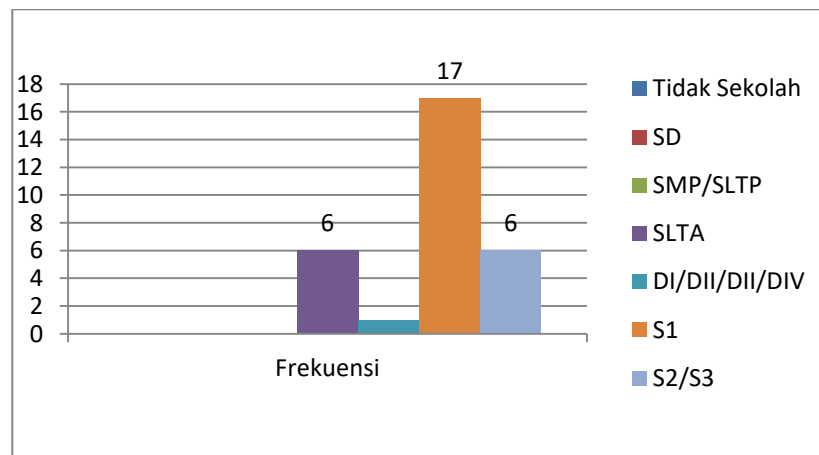
Dari 30 (tiga puluh) responden yang mengisi kuesioner tersebut ada 20,00% pendidikan SLTA, 3,33% pendidikan Diploma, 56,67% pendidikan Sarjana (S1), dan 20,00% pendidikan Pasca Sarjana (S2/S3). Berikut tabel responden berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden.

Tabel 4. Pendidikan Responden

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sekolah	0	0,00%
2	SD	0	0,00%

3	SMP/SLTP	0	0,00%
4	SLTA	6	20,00%
5	Diploma (DI/DII/DIII/DIV)	1	3,33%
6	Sarjana (S1)	17	56,67%
7	Pasca Sarjana (S2/S3)	6	20,00%
Jumlah Responden		30	100,00%

Grafik 3. Tingkat Pendidikan Responden



d Pekerjaan Responden

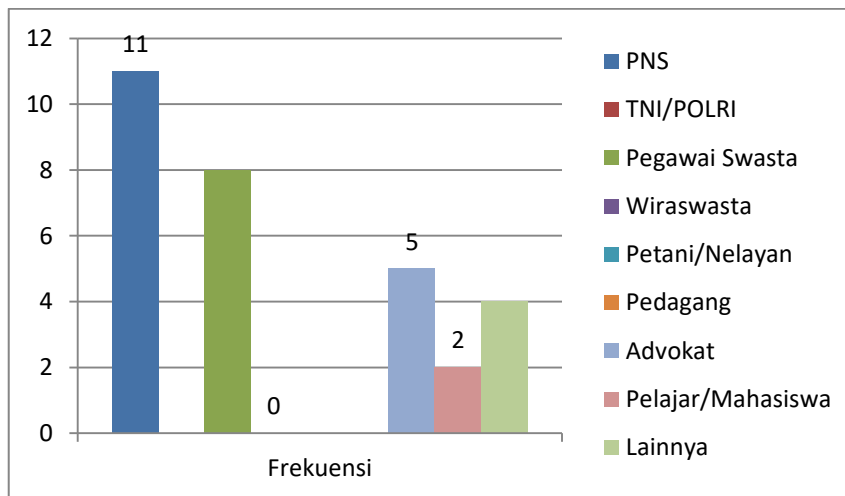
Dari 30 (tiga puluh) responden yang mengisi kuesioner tersebut ada 36,67% PNS, 26,67% Pegawai Swasta, 16,67% Adokat, 6,67% Pelajar/Mahasiswa dan 13,33% Lainnya. Berikut tabel responden berdasarkan Pekerjaan Responden.

Tabel 5. Pekerjaan Responden

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
1	PNS	11	36,67%
2	TNI/POLRI	0	0,00%
3	Pegawai Swasta	8	26,67%
4	Wiraswasta	0	0,00%

5	Petani/Nelayan	0	0,00%
6	Pedagang	0	0,00%
7	Advokat	5	16,67%
8	Pelajar/Mahasiswa	2	6,67%
9	Lainnya	4	13,33%
	Jumlah Responden	30	100,00%

Grafik 4. Pekerjaan Responden



2) Perhitungan Hasil Survey

Jumlah responden yang mengisi kuisisioner Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Triwulan III Tahun 2025 ada 30 (tiga puluh) responden. Responden tersebut terdiri dari berbagai unsur lapisan masyarakat.

Rincian Pengolahan Index Kepuasan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

**HASIL SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI PELAYANAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
PERIODE JULI S/D SEPTEMBER TAHUN 2025**

Nomor Urut responden	NILAI PER INDIKATOR				
	I1	I2	I3	I4	I5
1	6	6	6	6	6
2	6	6	6	6	6
3	6	6	6	6	6
4	5	5	5	5	5
5	6	5	6	6	6
6	6	6	6	6	6
7	6	6	6	6	6
8	6	6	6	6	6
9	6	6	6	6	6
10	6	6	6	6	6
11	6	6	6	6	6
12	5	5	5	5	5
13	6	5	6	5	6
14	5	5	4	4	5
15	6	6	6	6	6
16	6	6	6	6	6
17	6	6	6	6	6
18	6	6	5	5	5
19	6	6	6	6	6
20	6	6	6	6	6
21	6	6	6	6	6
22	6	6	6	6	6
23	6	6	6	6	6
24	6	6	6	6	6
25	6	6	6	6	6
26	6	6	6	6	6
27	6	6	6	6	6
28	5	5	6	6	5
29	6	6	6	6	6
30	6	6	6	6	6

Jumlah Nilai per unsur	176	174	175	174	175
Nilai Rata -Rata per Unsur/jumlah responden	5.867	5.800	5.833	5.800	5.833
Nilai Rata - rata Skala 4 = Nilai rata-rata skala 4 x 16,67 / 25	3.912	3.867	3.890	3.867	3.890
Jumlah rata-rata skala 4	3.885				
Indeks Kepuasan Masyarakat	97.131				
Mutu Persepsi Korupsi	4				
Kinerja Persepsi Korupsi	BERSIH DARI KORUPSI				

Dari perhitungan pengolahan index diatas, Nilai Index Persepsi Korupsi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 97,131 (Sembilan Puluh Tujuh Koma Satu Tiga Satu). dan jika dikonversikan dalam nilai Mutu Persepsi Korupsi adalah 4, sehingga Kinerja Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Triwulan III Tahun 2025 adalah Bersih Dari Korupsi.

C. Hasil yang dicapai

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat pada Periode Triwulan III (Juli - September) Tahun 2025, dengan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pengolahan survey indeks kepuasan masyarakat pada Triwulan III 2025 terdapat 30 (tiga puluh) responden yang mengisi survey. Nilai indeks kepuasan masyarakat Triwulan III 2025 adalah 97,131 (Sembilan Puluh Tujuh Koma Satu Tiga Satu) dengan nilai mutu Persepsi Korupsi adalah 4, Kinerja Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Triwulan III Tahun 2025 adalah Bersih Dari Korupsi.
2. Dari Perhitungan Hasil Survey tersebut juga terdapat beberapa unsur yang memperoleh nilai paling rendah dan membutuhkan perhatian, yaitu tidak ada pelayanan diluar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini dan tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini.
3. Nilai indeks persepsi korupsi Triwulan III 2025 adalah 97,131 (Sembilan Puluh Tujuh Koma Satu Tiga Satu) lebih tinggi dibandingkan dengan Nilai indeks persepsi korupsi Triwulan II 2025 adalah 96,686 (Sembilan Puluh Enam Koma Enam Delapan Enam)

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah melaksanakan Survey Persepsi Korupsi Triwulan III Tahun 2025 dan dari perhitungan pengolahan survey indeks kepuasan masyarakat pada Triwulan III 2025 terdapat 30 (tiga puluh) responden yang mengisi survey. Nilai indeks kepuasan masyarakat Triwulan III 2025 adalah 97,131 (Sembilan Puluh Tujuh Koma Satu Tiga Satu) dengan nilai mutu Persepsi Korupsi adalah 4, Kinerja

Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Triwulan III Tahun 2025 adalah Bersih Dari Korupsi.

2. Saran

Dalam pelaksanaan survey agar dapat mengoptimalkan pengguna layanan yang ada dalam kurun waktu periode survey terutama pengguna layanan informasi dan layanan kesekretariatan.

E. Penutup

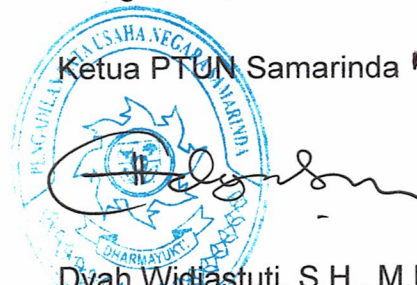
Dengan hasil survey IPK tersebut, terus dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan integritas dan kebijakan-kebijakan yang mendukung pencegahan KKN, anti suap/anti gratifikasi/anti pungli, sehingga terus mampu menjaga kredibilitas dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Demikian Laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ini disusun agar dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pelayanan serta sarana dan prasarana di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Dibuat di Samarinda,
Pada Tanggal, 1 Oktober 2025

Mengetahui,

Ketua PTUN Samarinda



Dyah Widiastuti, S.H., M.H. *D*
NIP. 197703142000122002